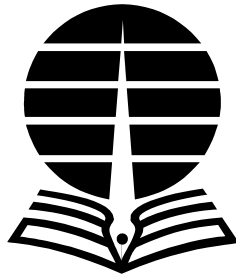


LAPORAN PENELITIAN MULA

BIDANG KELEMBAGAAN



**IMPELEMENTASI KEBIJAKAN KANTOR PEMBANTU REKTOR IV UT
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN DANA SOSIALISASI DAN
PROMOSI DALAM MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI
MAHASISWA DI UPBJJ UT AMBON**

OLEH

MUHAMMAD TAHIR KAREPESINA

(tahir@ut.ac.id)

UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH

UNIVERSITAS TERBUKA

AMBON

2014

LEMBAR PENGESAHAN

PENELITIAN MULA BIDANG KELEMBAGAAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TERBUKA

1.a. Judul Penelitian : Impelementasi Kebijakan Kantor Pembantu Rektor IV Universitas
Terbuka Tentang Pemberian Tambahan Dana Sosialisasi dan Promosi
Dalam meningkatkan Angka Partisipasi Mahasiswa di UPBJJ UT Ambon

b. Bidang Penelitian : Kelembagaan

c. Kualifikasi Penelitian : Penelitian Mula

2. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Muhammad Tahir Karepesina, S.Sos., M.Si

b. NIP : 19710915 200604 1 002

c. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I/IIIb

d. Jabatan Akademik/Fak/Unit

Kerja : Asisten Ahli/ FISIP UT dpk UPBJJ UT Ambon

3.a. Periode Penelitian : 2014

b. Lama Penelitian : 9 bulan

4. Biaya Penelitian : Rp 10.000.000.-

5. Sumber Biaya : LPPM UT

6. Pemanfaatan Hasil Penelitian: Seminar nasional/regional dan Jurnal UT/Nasional

Mengetahui

Kepala UPBJJ UT Ambon



Drs Supartomo C.B., M.Si

NIP 19521022 198203 1 002

Ketua Peneliti

Muhammad Tahir Karepesina, S.Sos., M.Si

NIP 10711509 200604 1 002

Menyetujui

Ketua LPPM



Ir Kristanti Ambar Puspitasari, M.Ed., Ph.D

19610212 198603 2 001

SURAT PERNYATAAN REVIEWER-1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chanif Nurcholis, Drs, M.Si. Dr.
NIP : 195902021992031002
Jabatan : Lektor Kepala

Telah menelaah laporan penelitian

Judul : Implementasi Kebijakan Kantor Pembantu Rektor IV UT Tentang Pemberian
Tambahan Dana Sosialisasi dan Promosi dalam Meningkatkan Angka
Partisipasi Mahasiswa di UPBJJ UT Ambon.

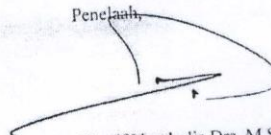
Peneliti : Muhammad Tahir Karepesina.

Menyatakan bahwa laporan tersebut layak diterima sebagai laporan Penelitian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tangerang Selatan, 20 Desember 2014

Penelaah,



Chanif Nurcholis Drs, M.Si. Dr

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Kantor Pembantu Rektor IV UT Tentang Pemberian Tambahan Dana Sosialisasi dan Promosi Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Mahasiswa di UPBJJ UT Ambon. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dilakukan sebuah penelitian untuk menganalisis Implementasi Kebijakan tersebut dilihat dari Variabel 1) Implementasi Kebijakan yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap, Struktur birokrasi. 2) Variabel Sosialisasi dan Promosi yang meliputi Manajemen dan penyelenggaraan, Efektifitas pelaksanaan, Prosedur pelaksanaan, Rincian biaya yang digunakan, Waktu pelaksanaan, dan 3) Variabel Angka Partisipasi Mahasiswa yang meliputi Jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan Jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi ulang (Mata Kuliah). Penelitian ini melibatkan responden Mahasiswa Non Pendas dan unsure Pimpinan yang terdiri dari Kepala UPBJJ UT Ambon, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Badan pengelola Pendidikan UT di Namlea, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Setelah dilakukan analisis, data menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Kantor Pembantu Rektor IV Tentang Pemberian Tambahan Dana Sosialisasi dan Promosi dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Mahasiswa di UPBJJ UT Ambon tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dana Sosialisasi dan Promosi, Angka Partisipasi Mahasiswa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki keterbelakangan dan ketertinggalan dalam semua bidang kehidupan menuju suatu keadaan yang lebih baik dari pada keadaan sebelumnya. Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual.

Pencapaian tujuan nasional dilakukan dengan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. untuk mewujudkan cita-cita bersama sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan sejumlah amanat tersebut maka dalam upaya pembangunan nasional dibutuhkan sejumlah kebijakan yang dapat memfasilitasi upaya tersebut.

Timbulnya kebijakan disebabkan karena adanya gejala yang muncul atau dirasakan dalam masyarakat. Jadi kebijakan tidak hanya bertumpu pada keadaan-keadaan dalam organisasi saja yang bersifat entropi akan tetapi lebih dinamis oleh karena bersumber dari kehidupan masyarakat.

Berkenaan dengan itu disatu pihak kebijakan publik menekankan pada keinginan rakyat banyak yang hidup dalam masyarakat luas suatu negara, dan tidak hanya berdasarkan pada kemauan elit yang berkuasa. Sedangkan dipihak lain bentuk organisasi tidak menekankan pada mekanisme sistem entropi dan memerlukan proses pengembangan dan pembinaan organisasi yang terus menerus. (Silalahi, 1999 : 148).

Sementara para ahli berpendapat bahwa hal yang paling esensial dalam kebijakan publik adalah usaha untuk melaksanakan kebijakan publik. Jika suatu kebijakan telah diputuskan kebijakan tersebut tidak berhasil dan terwujud bilamana tidak dilaksanakan. (Wahab, 2002 : 127).

Pejabat politik harus memikirkan bagaimana membuat kebijakan. Sekarang timbul pertanyaan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Usaha untuk melaksanakan kebijakan tentu membutuhkan suatu keahlian dan ketrampilan, menguasai persoalan yang hendak dikerjakan, dalam hal ini kedudukan birokrasi menempati posisi yang strategis karena birokrasilah yang berkewajiban melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga birokrasi senantiasa dituntut untuk mempunyai keahlian dan ketrampilan yang tinggi.

Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu upaya nyata dalam bentuk pelaksanaan kebijakan maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang penting didalam kebijakan publik .

Menurut Robert Nakamura dan Diane MP, (1974 : 123) hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkannya ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky, implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut. Atau, kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Pendapat Pressman dan Wildavsky ini dikritik oleh Jones, (1996, 1996 : 212) karena tidak cukup mengkonkritkan maksud-maksud yang ada, sekalipun definisi tersebut telah menggambarkan dengan tepat interaksi antara elemen-elemen tersebut yakni antara apa yang diinginkan dengan metode-metode untuk mendapatkannya.

Salah satu definisi mengenai kebijakan pemerintah diberikan oleh Robert Eyestone (dalam Winarno 2002 : 15) Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Batasan lain tentang kebijakan public diberikan Thomas R. Dye (2002 : 16) yang mengatakan bahwa “kebijakan pemerintah adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Walaupun batasan yang diberikan oleh Thomas R. Dye ini agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberikan pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan

seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya berada di luar domain kebijakan pemerintah.

Universitas Terbuka sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan tinggi tentu punya berbagai kebijakan tentang operasional institusi. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Universitas Terbuka, maka Kantor Pembantu Rektor IV merumuskan sebuah kebijakan dalam rangka memberikan tambahan Dana Sosialisasi dan Promosi.

Dana tersebut, selanjutnya didistribusikan kepada unit-unit program belajar jarak jauh yang ada di lingkungan Universitas Terbuka. Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Ambon sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Universitas Terbuka juga menerima dana bantuan tersebut. Sebanyak 75.000.000.- digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan promosi dalam wilayah UPBJJ UT Ambon.

Dalam kenyataannya realisasi penggunaan dana tersebut di UPBJJ UT Ambon terdapat banyak kendala. Kendala-kendala tersebut terlihat dari perencanaan yang kurang matang. Hal ini terlihat dari penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya. Dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan promosi, namun juga digunakan untuk kegiatan lain. (hasil wawancara dengan Kasubag TU UPBJJ UT Ambon). Alokasi penggunaan dana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 1: Alokasi Penggunaan Dana Sosprom 2013

No	Jenis Kegiatan	Alokasi Dana	Keterangan
1	Sosialisasi melalui RRI Ambon	34.000.000	Sesuai
2	Sosialisasi melalui spanduk	4.500.000	Sesuai
3	Kegiatan lain diluar sosialisasi dan promosi	36.500.000	Tidak sesuai

Sumber: Bendahara Pembantu Pengeluaran UPBJJ UT Ambon

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa sebanyak 36.500.000.- atau 48,67% penggunaan dana sosialisasi dan promosi tidak tepat sasaran bahkan salah prosedur, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap tujuan utama sosialisasi dan promosi yakni mengenalkan Universitas Terbuka kepada masyarakat luas.

Hasil dari sosialisasi dan promosi tersebut selain mengenalkan Universitas Terbuka, tentunya juga dapat meningkatkan angka partisipasi mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka. Angka partisipasi tersebut antara lain adalah mahasiswa yang melakukan registrasi mata kuliah (registrasi ulang) dan registrasi mahasiswa baru. Uraian mahasiswa yang melaksanakan registrasi mata kuliah dan registrasi mahasiswa baru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2: Keadaan Mahasiswa pada UPBJJ UT Ambon periode 2013.2 - 2014.1

No	Lokasi Belajar	Jumlah Mahasiswa						Ket
		2013.2			2014.1			
		Reg Mata Kuliah	Baru	Jumlah	Reg Mata Kuliah	Baru	Jumlah	
1	Ambon	235	69	304	225	21	246	Turun
2	Piru	178	17	195	181	23	204	Naik
3	Bula	3	0	3	14	25	39	Naik
4	Masohi	69	1	70	89	28	117	Naik
5	Namlea	50	8	58	50	3	53	Turun
6	Tual	105	8	113	68	7	75	Turun
7	Saumlaki	51	14	65	48	10	58	Turun
8	Dobo	126	8	124	132	11	143	Naik
9	Kisar	93	7	100	79	13	92	Turun
	Jumlah	910	132	1042	886	141	1027	Turun

Sumber: Data registrasi dan ujian

Data tersebut diatas memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan angka partisipasi mahasiswa baru pada periode 2014.1 bila dibandingkan periode 2013.2. Namun peningkatan ini tidak dibarengi dengan peningkatan registrasi ulang mata kuliah pada periode 2014.1 bila dibandingkan dengan periode 2013.2. sehingga secara keseluruhan terjadi penurunan angka partisipasi mahasiswa yang melakukan registrasi ulang mata kuliah maupun regiatrasi mahasiswa baru pada periode 2014.1 bila dibandingkan dengan periode 2013.2

Berangkat dari pengertian-pengertian, Paparan data dan kesenjangan yang ada di UPBJJ UT Ambon tersebut diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian atas masalah tersebut dengan tema “ **Implementasi Kebijakan Kantor Pembantu Rektor IV Universitas Terbuka Tentang Pemberian Tambahan Dana Sosialisasi dan Promosi Dalam Meningkatkan Angka**

**Partisipasi Mahasiswa di Unit Program belajar Jarak Jauh Universitas
Terbuka (UPBJJ UT) Ambon.**

B. Permasalahan dan Pembatasan Masalah

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah : ***“Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Kantor Pembantu Rektor IV Universitas Terbuka Tentang Pemberian Tambahan Dana Sosialisasi dan Promosi Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Mahasiswa di Unit Program belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ UT) Ambon.?”***

2. Pembatasan Masalah

Karena ruang lingkup kebijakan begitu luas, maka penelitian ini hanya dibatasi pada bagaimana UPBJJ UT Ambon Mengimplementasikan Penggunaan Dana Bantuan Sosialisasi dan Promosi yang diberikan oleh Kantor Pembantu Rektor IV Tahun 2013. Mengingat wilayah kerja UPBJJ UT Ambon yang begitu luas dan terdiri dari pulau-pulau, maka subjek penelitian ini dibatasi pada mahasiswa UT Program Non Pendas yang ada di Namlea Kabupaten Buru.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui secara mendalam tentang sejauhmana Implementasi Penggunaan Dana Bantuan Sosialisasi dan Promosi

yang diberikan oleh Kantor Pembantu Rektor IV selama 2013 di UPBJJ UT Ambon

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. UPBJJ UT Ambon khususnya dan Universitas Terbuka dalam mengevaluasi pemberian dana bantuan sosialisasi dan promosi.
- b. Ilmu pengetahuan dalam rangka memperkaya khasanah Ilmu Administrasi

D. Definisi Operasional

1. Variabel Implementasi Kebijakan.

Variable ini diukur melalui :

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi atau sikap
- d. Struktur birokrasi

2. Variabel Sosialisasi dan Promosi

Variabel ini diukur melalui

- a. Manajemen dan penyelenggaraan
- b. Efektifitas pelaksanaan
- c. Prosedur pelaksanaan
- d. Rincian biaya yang digunakan
- e. Waktu pelaksanaan

3. Variabel Angka Partisipasi Mahasiswa (2014)

Variabel ini diukur melalui

- a. Jumlah mahasiswa baru yang mendaftar
- b. Jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi ulang (Mata Kuliah)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Banyak sekali pengertian yang telah digunakan oleh pakar tentang kebijakan publik, maupun banyak ilmuwan yang merasa kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan. Hal tersebut dikarenakan sifat dari kebijakan publik yang terlalu luas dan tidak spesifik dalam operasional.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone (dalam Winarno 2002 : 15) Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan Thomas R. Dye (2002 : 16) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Walaupun batasan yang diberikan oleh Thomas R. Dye ini agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya berada di luar domain kebijakan publik.

Friedrich (2007 : 3) mengartikan kebijakan publik sebagai “suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Defenisi yang diberikan oleh Friedrich ini pada dasarnya mempunyai dimensi yang luas. Kebijakan publik dalam hubungan ini harus dipahami bukan saja sebagai tindakan oleh pemerintah tetapi juga oleh perseorangan atau sekelompok orang. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari peluang-peluang karena adanya hambatan-hambatan dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian kebijakan publik tersebut di atas dan mengikuti paham bahwa kebijaksanaan negara itu harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat, maka menurut Aderson (Islamy 1997 : 19) mengemukakan pengertian kebijakan publik adalah Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Atas dasar pengertian tersebut maka kebijakan publik mempunyai implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;

2. Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata;
3. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu;

Pernyataan ataupun pendapat tersebut di atas menarik untuk dikaji dalam pengertian bahwa pada dasarnya kebijakan publik merupakan sebuah sikap dari pemerintah yang harus diorientasikan pada tindakan tertentu. Pemerintah sebagai sebuah institusi yang dibentuk untuk melakukan tugas-tugas kepublikan harus melakukan serangkaian program tindakan yang hendak direalisasikan dalam bentuk yang nyata. Oleh karena itu pada dasarnya kebijakan publik berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Ini berarti sukses tidaknya sebuah kebijakan publik ditentukan oleh penilaian masyarakat atas kebijakan tertentu.

Dengan demikian bilamana kebijakan publik itu dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut telah memenuhi fungsinya dengan baik. Namun bilamana sebaliknya maka kebijakan publik tersebut gagal dalam memenuhi fungsinya.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Proses implementasi sesungguhnya tidak hanya mengungkap hal-hal yang terjadi setelah program diimplementasikan tetapi juga mencakup pilihan model implementasi, aktor-aktor yang terlibat dalam proses

implementasi, instrumen implementasi, strategi implementasi, serta program dengan operasionalisasinya.

Selanjutnya dengan memaparkan secara detail tentang berbagai teori implementasi kebijakan, maka terlebih dahulu diuraikan apa sesungguhnya implementasi kebijakan itu sendiri. Dalam kamus Webster (Abdul Wahab, 1997:64) dirumuskan secara pendek bahwa “*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out : to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Unsur lain yang terpenting dalam implementasi kebijakan adalah kepatuhan (*compliance*). Yang dimaksud dengan kepatuhan disini adalah mengacu pada batasan dari Rodgers dan Bullock yaitu “*overt behavior which is in accord with the law*” (perilaku yang jelas sebagai persetujuan pada hukum). Memang kebijakan itu selalu berdasarkan hukum atau peraturan tertentu, sehingga pelaksanaan kebijakan itu pun seharusnya patuh kepada hukum yang mendasarinya.

Sementara ahli berpendapat bahwa implementasi kebijakan jauh lebih penting dari formulasi kebijakan. Rumusan kebijakan yang dibuat tidak akan memiliki arti apa-apa kalau tidak di implementasikan. Udoji (2007:48) dengan tegas mengatakan “ *the execution of policies is as important if not*

more important than policy making. Policies will remain dreams or blueprints file jackets unless they are implemented". (pelaksanaan kebijakan-kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian-impian atau rencanan-rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan)

Dalam pengertian yang lebih luas dapat dikatakan bahwa kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan memiliki manfaat bilamana tidak diimplementasikan. Melalui implementasi kebijakan maka rencana-rencana atau program-program yang masih bersifat abstrak diusahakan perwujudannya dalam kenyataan. Dengan kata lain pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (outcome) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (target groups). (Widodo : 2007:49).

Selanjutnya untuk memahami lebih jauh tentang konsep implementasi, Mazmanian dan Sabatier (1997:65) menjelaskan konsep implementasi dengan menyatakan "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian".

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan pada hakekatnya tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakan atau perilaku badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program dan menimbulkan kepatuhan dari target group. Namun lebih jauh dari itu juga bergayut dengan jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terhadap dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Dan berbagai pengertian konsep implementasi yang dijelaskan di atas, maka untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung terdapat sejumlah pandangan dari implementasi kebijakan yang dapat dijadikan acuan untuk mengefektifkan implementasi.

3. Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Analisa tentang bagaimana kebijakan publik berlangsung secara efektif dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan publik. Pearsons (2007 :56). Membagi perkembangan model implementasi kebijakan publik menjadi 4 tahap:

- a. Pertama, model analisi kegagalan yang memandang implementasi kebijakan publik sebagai proses interaksi antara penyusunan tujuan dengan tindakan, implementasi sebagai politik adopsi yang saling menguntungkan dan implementasi sebagai bentuk permainan
- b. Kedua, Model Rasional (*Top Down*) untuk mengidentifikasi faktor mana yang membuat implementasi sukses

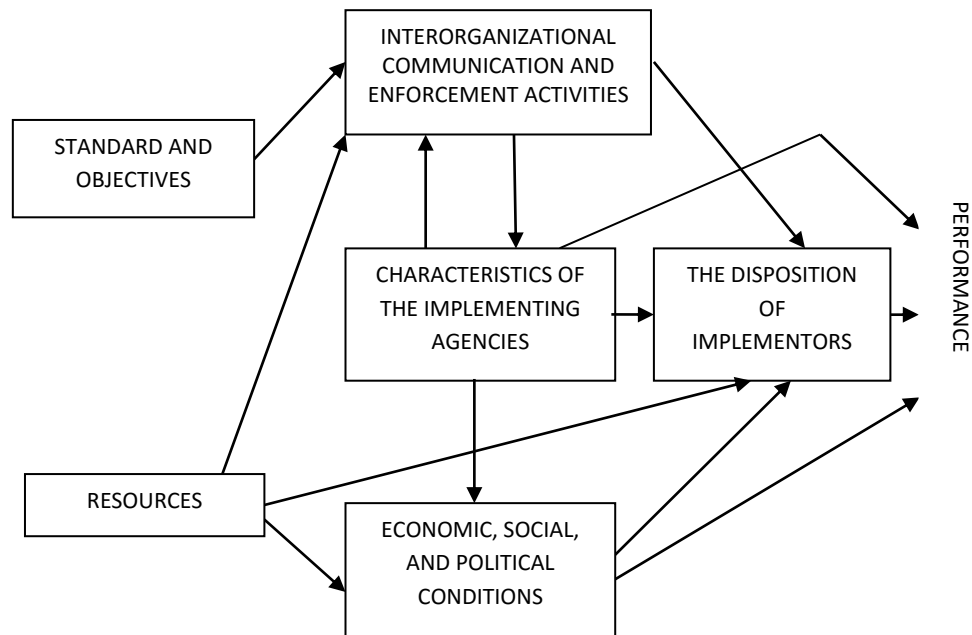
- c. Ketiga, kritikan dan pendekatan *bottom up* terhadap pendekatan *Top Down* dalam hubungannya dengan pentingnya factor-faktor lain dan interaksi organisasi. Misalnya implementasi kebijakan harus memperhatikan interaksi antara pemerintah dengan warga Negara, implementasi sebagai proses yang disusun melalui konflik dan tawar-menawar, implementasi harus memakai *multiple framework*; implementasi harus dianalisis dalam konteks institutional structures dan implementasi merupakan proses alur
- d. Keempat, teori-teori klasik hasil sintesis yang memandang implementasi kebijakan sebagai evolusi, sebagai pembelajaran, sebagai *policy action continuum*; sebagai sirkuler *leadership*; sebagai hubungan inter organisasi; sebagai hubungan antar kontingensi; sebagai analisis kasus; sebagai bagian sub system kebijakan dan implementasi sebagai manajemen sector public.

Beberapa Model Implementasi Kebijakan diantaranya yaitu :

1. Model Meter dan Horn

Meter dan Horn (Wibowo 2007 : 57-59) merumuskan sebuah model implementasi kebijakan seperti terlihat pada uraian-uraian berikut ini. :

Gambar 1 : Model Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn



Gambar pada model tersebut menunjukkan bahwa kinerja kebijakan yang tinggi hanya akan diraih melalui antar hubungan berbagai faktor. Menurut model ini suatu kebijakan tentu memiliki standar dan tujuan tertentu yang harus dicapai. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tertentu. Karena dijadikan sebagai kriteria penilaian maka standar dan sasaran dirumuskan secara konkrit dan spesifik.

Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya yang akan memadai. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (insentif) lain yang mendorong dan mempelancar implementasi.

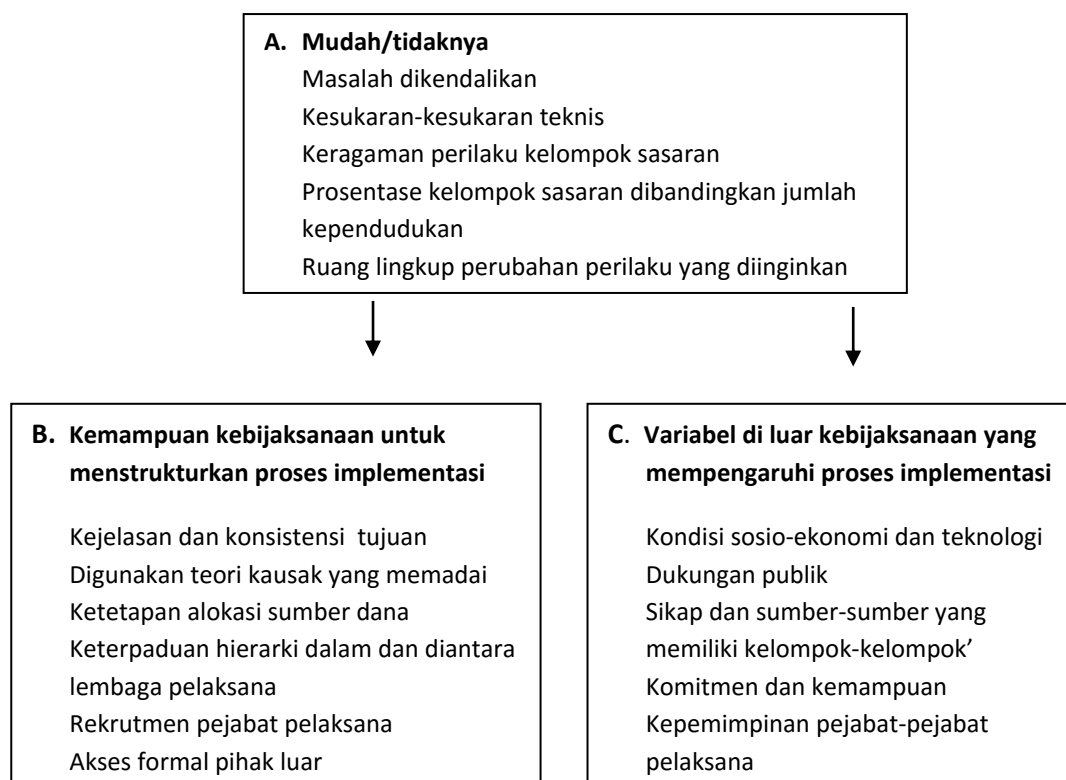
Walaupun standar dan sasaran mudah ditentukan secara jelas, tidak berarti implementasi kebijakan akan efektif kalau tidak dibarengi oleh adanya komunikasi antara organisasi dan aktifitas pelaksanaan. Semua

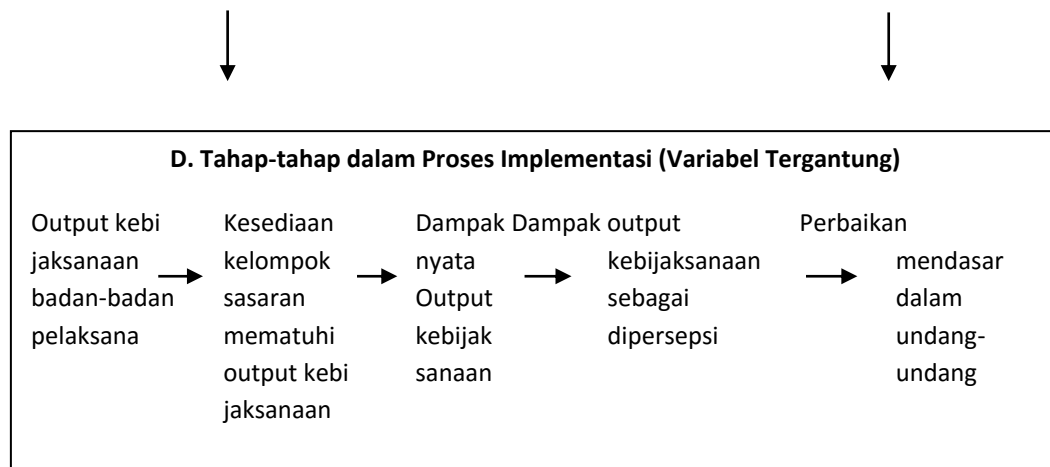
pelaksana harus memahami apa yang dikehendaki oleh kebijakan yang implementasinya merupakan tanggung jawab mereka. Dengan demikian sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi, ketepatan komunikasi dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang di komunikasikan dengan berbagai simbol.

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Model ini disebut *A Frame Work Implementations Analysis* (Kerangka Analisis Implementasi). Dalam model ini Mazmanian dan Sabatier (Winarno 2005:25) berpendapat bahwa peranan penting dari analisa implementasi kebijakan ialah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Model tersebut dapat digambarkan seperti dibawah ini.

Gambar 2.. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier





Melalui gambar diatas terlihat bahwa implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel tersebut yaitu :

1. Mudah tidaknya masalah dikendalikan (karakteristik masalah)
2. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, dan,
3. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi

Variabel mudah tidaknya masalah dikendalikan merupakan *independent variable*. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dan variable lain di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi merupakan *intervening variable* dan tahapan dalam proses implementasi yang terdiri dari lima tahapan merupakan *dependen variable*

Kerangka berfikir Mazmanian dan Sabatier pada dasarnya tidak berbeda dengan Meter dan Horn serta Grindle. Dikatakan demikian karena ketiga model tersebut memusat perhatiannya pada dua hal yang mendasar

yaitu kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hanya saja menurut Wibawa (Winarno 2002 : 27) pemikiran Mazmanian dan Sabatier terkesan menganggap bahwa implementasi suatu kebijakan akan efektif bilamana birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis).

Dengan asumsi tersebut maka tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten karena ia merupakan standart evaluasi dan sasaran yang legal bagi birokrat pelaksana dalam mengarahkan sumber dana. Oleh karena itu kedudukan variabel indenpendent terhadap perubahan kondisi fisik dan sosial yang dikehendaki harus logis (tersedia penjelasan empiris, paling tidak teoritis) .

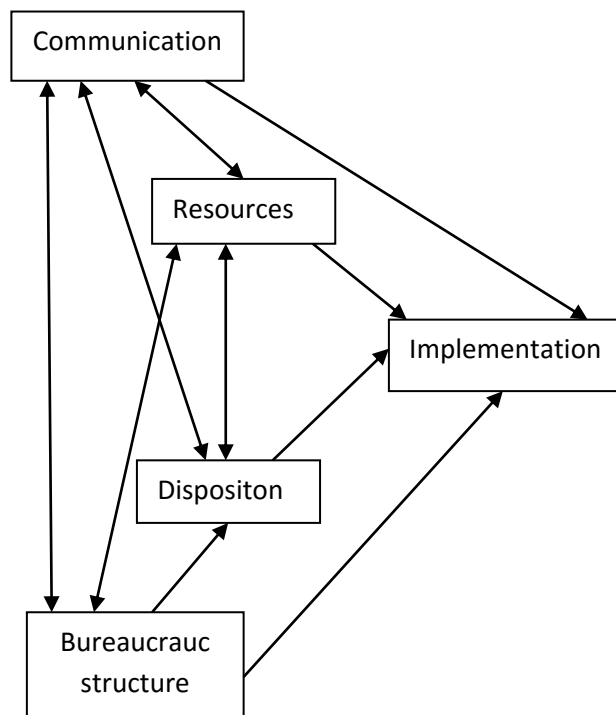
3. Model George C Edwards III

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III (<http://www.geogle.com/implementing publik policy>). Ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*)

Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita

adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara *breakdown* (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan George Edward III



Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George

C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan

dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementator mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkan. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah

staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidak mampuan pelaksanaan program ini disebabkan karena kebijakan pemerintah daerah merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program peraturan daerah ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai akan penyelenggaraan pemerintahan maupun administrasi kepada publik.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun

seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;

2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Sumber (<http://www.geogle.com/implementing public policy>). Diakses 10 Januari 2014

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Data Penelitian diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti objek kajian dengan mengadakan interaksi (wawancara) dengan para informan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Kantor Pembantu Rector IV Tentang Pemberian Tambahan Dana Sosialisasi dan Promosi dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Mahasiswa di UPBJJ UT Ambon.

Data yang didapatkan berupa kalimat tertulis maupun lisan dari responden, selanjutnya data tersebut ditampilkan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang merupakan gambaran factual dan akurat yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

B. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian jumlah instrumen yang digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Daftar Penggunaan dan personil yang ditugaskan untuk melakukan sosialisasi dan Promosi melalui Radio Republik Indonesia wilayah Maluku dan Maluku Utara, 2) data jumlah spanduk yang dikirim ke lokasi Kelompok Belajar Non Pendas di Daerah-Daerah dan 3) data tentang penggunaan dana sosialisasi dan promosi untuk kegiatan diluar sosialisasi dan promosi.

2. Data Primer. Data ini diperoleh dari Informan dengan menggunakan:

- a. Wawancara mendalam dan terbuka, dimana data yang diperoleh dari informan dalam bentuk informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. selain itu juga peneliti menentukan informan kunci yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yaitu:
 - 1) Kepala UPBJJ UT Ambon. Informasi/data yang ingin dicapai adalah menyangkut seluruh indikator dalam ketiga variable penelitian ini.
 - 2) Kepala sub Bagian Tata Usaha UPBJJ UT Ambon. Informasi/data yang ingin dicapai adalah menyangkut seluruh indikator dalam ketiga variable penelitian ini.
 - 3) Bendahara Pembantu Pengeluaran UPBJJ UT Ambon. Informasi/data yang ingin dicapai adalah menyangkut seluruh indikator Rincian Biaya yang digunakan pada variable Sosialisasi dan Promosi
 - 4) Pengelola Badan Penyelenggaran Pendidikan (BPP UT) Kabupaten Buru. Informasi/data yang ingin dicapai adalah menyangkut semua

Indikator yang ada dalam Variable Sosialisasi dan Promosi dan Variabel Angka Partisipasi Mahasiswa.

- b. Observasi langsung ke lokasi terutama di lokasi kelompok belajar Namlea Kabupaten Buru untuk melihat alat peraga sosialisasi dan promosi serta di kantor UPBJJ UT Ambon tempat dimana sehari-hari peneliti melaksanakan rutinitas kantor untuk melihat kegiatan, evaluasi kegiatan menyangkut dengan objek penelitian

C. Metode Analisa Data

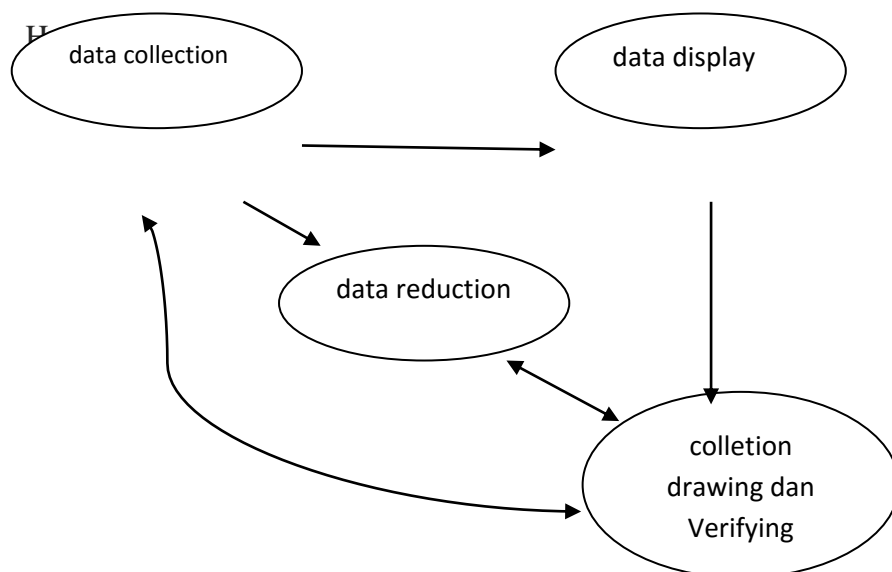
Analisa data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diberitakan kepada orang lain. (Bogdan dan Biken dalam Moleong:1997)

Dalam melakukan analisis data penelitian mengacu pada beberapa tahapan yang menurut Miles dan Huberman (dalam Moleong: 1997) terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang kompatibel terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.

2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Tujuan diadakan transkrip data untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif grafik, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification) yaitu mencari pola-pola penjelasan, konfigurasi yang utuh. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya. Model analisis data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4: Model Analisis Data Kualitatif menurut Milles dan



Model Interaktif, analisa data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan Mahasiswa

Keadaan Informan dalam Penelitian ini terdiri dari mahasiswa Program Non Pendas yang berdomisili di Lokasi Ujian Namlea menurut Pekerjaan, Waktu Studi, Perkembangan Prestasi Akademik dalam Tiga Semester terakhir dan Jenis Kelamin. Uraian identitas Informan sebagaimana terlihat pada table-tabel berikut ini.

Tabel 2 : Keadaan Informan Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	11 Orang
2.	TNI/Polri	1 Orang
3.	Wiraswasta	7 Orang
4.	Lain-lainnya	4 Orang
Jumlah		23 Orang

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan.

Tabel 3 : Keadaan informan Berdasarkan Waktu Studi

No	Pendidikan	Jumlah
1.	10 semester keatas	9 Orang
2.	7 – 9 semester	5 Orang
3.	4 – 6 semester	7 Orang

4.	1 – 3 semester	2 Orang
Jumlah		23 Orang

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan.

Tabel 4 : Keadaan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	5 Orang
2.	Perempuan	18 Orang
Jumlah		23 Orang

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan.

B. Identitas Informan Kunci

Identitas informan kunci adalah Kepala UPBJJ UT Ambon, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPBJJ UT Ambon, Bendahara Pembantu Pengeluaran UPBJJ UT Ambon, dan Badan Pengelola Pendidikan Lokasi Namlea. Identitas Informan informan kunci meliputi jenis kelamin, Umur, tingkat Pendidikan. Keadaan Informan Informan Kunci sebagaimana diuraikan pada table-tabel dibawah ini.

Tabel 6. Jenis Kelamin Informan Kunci

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi (f)	Persentase (%)	Keterangan
1.	Laki-laki	3	75	N = 4
2.	Perempuan	1	25	
Jumlah		4	100	

Sumber Data : Hasil Penelitian, 2014

Tabel 8. Umur Informan Kunci

No.	Tingkat Umur	Frekuensi (f)	Persentase (%)	Keterangan
1.	20 – 30 Tahun			N=4
2.	31 – 40 Tahun	1	25	
3.	41 – 50 Tahun	2	50	
4.	50 – 60 Tahun			
5	61– Tahun keatas	1	25	
Jumlah		4	100	

Sumber Data : Hasil Penelitian, 2014

Pada data table menunjukkan bahwa dari 1 orang informan kunci yang berumur 31-40 Tahun, 1 orang (25%), yang berumur 41-50 Tahun sebanyak 2 orang (50), yang berumur 61 Tahun keatas sebanyak 1 orang (25%).

Tabel 9. Tingkat Pendidikan Informan Kunci

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi (f)	Persentase (%)	Keterangan
1.	SMA/SMK	1	25	N=4
2.	S1/Sarjana	2	50	
3.	S2/Magister	1	25	
4.	S3/Doktor			
Jumlah		4	100	

Sumber Data : Hasil Penelitian, 2013

Pada data table menggambarkan bahwa dari 4 orang informan kunci yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 1 orang (25%), S1/Sarjana sebanyak 2 orang (50%), dan yang berpendidikan S2/Magister sebanyak 1 orang atau 25%.

C. Paparan Hasil Penelitian

1. Informan Mahasiswa

Data hasil penelitian dilakukan dengan menampilkan hasil wawancara dengan mahasiswa sebagai subjek dari sosialisasi dan promosi. Hasil wawancara antara lain sebagai berikut:

Pertama. Sosialisasi dan promosi yang dilakukan UPBJJ UT Ambon pada periode 2013 adalah kurang efektif. Dimana pada periode tersebut sosialisasi yang dilakukan hanya melalui 1 (satu) buah spanduk.

Kedua. Informasi yang disampaikan melalui spanduk tersebut hanya sebatas waktu registrasi Pendas dan Non Pendas serta program studi yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka. Sementara informasi-informasi penting dan substansial menyangkut, mekanisme registrasi, tata cara melakukan penawaran mata kuliah, teknik belajar mandiri dan mekanisme ujian bagi mahasiswa baru tidak dijelaskan.

Ketiga. Menurut pendapat para mahasiswa, kuliah di Universitas Terbuka masih butuh banyak sosialisasi, karena kuliah di Universitas Terbuka tidak sama dengan Perguruan Tinggi lainnya, dimana para mahasiswa bisa bertemu langsung dengan para dosen dan pengelola pendidikan tersebut.

Keempat. Jarak antara mahasiswa yang berada di daerah-daerah sangat jauh dengan pengelola Universitas Terbuka seperti yang ada di Ambon (UPBJJ). (Hasil Wawancara, 18-20 september 2014)

Solusi yang dapat diambil guna memecahkan permasalahan di atas adalah dengan melakukan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pemahaman kuliah di Universitas Terbuka. Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain, pertama, perlunya sosialisasi kepada mahasiswa baru ketika melakukan registrasi pertama melalui Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) sebelum masa tutorial berjalan. Kedua, sosialisasi hendaknya dilakukan secara tatap muka sehingga hal-hal yang tidak dan belum difahami oleh mahasiswa bisa ditanyakan langsung saat sosialisasi berjalan. Ketiga adalah menggunakan waktu disela-sela ujian untuk memberikan sosialisasi kepada mahasiswa. (Hasil wawancara dengan BPP Namlea, 20 september 2014)

Jawaban Informan mahasiswa dan pengelola Badan Penyelenggara Pendidikan Namlea adalah tanggapan responden dan informan kunci mengenai Sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh UPBJJ UT Ambon. Variabel Implementasi Kebijakan yang meliputi faktor Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau sikap, Struktur birokrasi dan Variabel Sosialisasi dan Promosi yang meliputi factor Manajemen dan penyelenggaraan, Efektifitas pelaksanaan, Prosedur pelaksanaan, Rincian biaya yang digunakan, Waktu pelaksanaan serta Variabel Angka Partisipasi Mahasiswa yang meliputi factor

Jumlah mahasiswa baru yang mendaftar, Jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi ulang (Mata Kuliah).

2. Informan Informan Kunci.

Informan Informan Kunci adalah Kepala UPBJJ, Kepala sub bagian Tata Usaha, Bendahara Pembantu Pengeluaran UPBJJ dan Pengelola Pendidikan UT di Namlea. Wawancara yang dilakukan terhadap informan kunci sebagaimana tertera pada table berikut:

Tabel 10 : Tanggapan Informan Informan Kunci Terhadap Variabel Implementasi Kebijakan

No	Variable	Tanggapan Informan		
		Kepala UPBJJ	Kasubbag TU	Pengelola UT
A	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN			
1	Komunikasi	Masih lemahnya manajerial di UPBJJ sehingga dalam melakukan sosialisasi dan promosi terlambat dalam membuat rencana, pelaksanaan dan control.	Komunikasi menyangkut sosprom selama ini masih terpusat di kasubbag TU, belum ada ide-ide yang efektif dalam pengelolaan terutama masukan dari staf. Paradigma ini harus dirubah. Dalam pelaksanaan sosprom, kita butuh dana awal, contohnya untuk melakukan sosprom ke SMA. Berikutnya sosprom berupa penyampaian misi UT ke instansi yang ingin lanjutkan pendidikan ke S2	Sebagai pengelola didaerah, selama ini ini kita hanya difungsikan sebagai tempat registrasi bagi mahasiswa, serta menyampaikan berbagai informasi menyangkut kegiatan akademik UT kepada mahasiswa
2	Sumber Daya	Sumber daya	Untuk sosprom	Dalam

		<p>daya tercukupi untuk itu, namun kegiatan belum berjalan dengan baik, bahkan agenda sosialisasi ke SMA/SMK juga tidak jalan.</p>	<p>konvensional cukup memadai. Namun kedepan perlu ditingkatkan mengenai kemampuan memasarkan sehingga lebih memadai, bila dibandingkan dengan sekarang dimana sosprom hanya sekedar ceramah. Sumber daya yang ada juga belum tepat sasaran dan harus didampingi.</p>	<p>konteks sumber daya yang dimiliki, saya rasa 1 staf untuk menangani sebanyak 50-an mahasiswa yang terdaftar masih mampu untuk mengelolanya.</p>
3	Disposisi/Sikap	<p>Saya tidak menutup mata dari budaya kerja yang belum ideal, untuk kita kembali lagi ke komunikasi dan perencanaan.</p>	<p>Seharusnya dibuat rencana dalam rapat persiapan sosprom dengan melibatkan semua staf, mengevaluasi sosprom sebelumnya dan menentukan mana yang efektif untuk dilaksanakan. Namun yang terjadi adalah mengulang sosprom sebelumnya (2012) dimana tanpa perencanaan, kurang tepat sasaran. Intinya semua belum dilaksanakan dengan baik.</p>	<p>Kami hanya menyampaikan berbagai kebijakan yang telah diambil oleh UPBJJ kepada mahasiswa.</p>
4	Struktur Birokrasi	<p>Menyangkut struktur birokrasi, maka kita kembali kepada yang namanya tata kelola. Dalam hubungannya dengan sosialisasi dan Promosi maka kita mulai</p>	<p>Dukungan staf masih kurang terutama dalam memberikan saran-saran, perencanaan karena selama ini masih terpusat pada kasubag TU. Struktur birokrasi cukup baik tapi</p>	<p>Pengelola di daerah terutama yang ada di Pokjar Namlea, dulunya punya struktur birokrasi</p>

		dari Tata Usaha. Dari Tata Usaha kita akan mulai dengan perencanaan yang baik sehingga hasil yang didapatkan juga sesuai harapan.	perlu adanya rutinitas rapat untuk efektivitas dan dijalankan dengan baik.	pengelolaan UT di Namlea, namun semuanya tidak aktif, dan saya hanya diminta bantuan untuk melaksanakan kegiatan registrasi.
--	--	---	--	--

Tabel 11 : Tanggapan Informan Kunci Terhadap Variabel Sosialisasi dan Promosi

N O	Variable	Tanggapan Informan		
		Kepala UPBJJ	Kasubbag TU	Pengelola UT
B	SOSIALISASI DAN PROMOSI			
1	Manajemen dan Penyelenggaraan	Pertama, sosprom yang kita lakukan adalah pengenalan menyangkut Universitas Terbuka. Kedua sebagian besar mahasiswa mengetahui tentang universitas Terbuka melalui cerita dari mulut ke mulut dan yang ketiga, mahasiswa UT tidak cukup hanya melalui sosprom itu, tapi butuh bimbingan dan pengawalan	Belum terlaksana dengan baik, kedepan harus dibuat tim sosprom yang diperkuat dengan SK. Tim ini diharapkan ikut memikirkan cara pelaksanaannya. Menyangkut penyelenggaraan masih kurang baik di manajemen sehingga pelaksanaannya juga kurang baik. Yang perlu digaris bawahi adalah perlu adanya evaluasi sosprom diawal tahun.	Cara melakukannya harus dirubah, kalau bisa harus dikoordinasikan dengan pengelola UT didaerah, jangan sampai kita hanya dijadikan sebagai tempat registrasi semata

		yang harus dipelihara.		
2	Efektivitas Pelaksanaan	Dalam membandingkan hasil yang dicapai, maka kita selalu mendapatkan mahasiswa baru. Dengan jumlah pendudukan 1,6 juta dimana mahasiswa UT sekitar 3000 orang, maka itu tidak jelek. Tetapi saya harus jujur kalau mahasiswa yang ideal dan nilai bagus selama ini adalah mahasiswa yang alih kredit dan SDMnya bagus.	Yang jalan pada periode 2013 cukup efektif walaupun hanya lewat RRI dan Spanduk. Dengan spanduk itu maka mengukuhkan pengelola UT di daerah sehingga mereka lebih mudah melakukan sosialisasi di daerah. Untuk Radio berpengaruh positif sehingga mahasiswa lama merasa diperhatikan, dan mereka bisa sosialisasikan UT di daerah.	Buat saya sosprom yang telah dilakukan tidak efektif karena mahasiswa ini berada pada tempat yang berbeda dan berjauhan, apalagi hanya dengan 1 buah spanduk
3	Prosedur Pelaksanaan	Sosialisasi dan promosi yang berjalan selama ini belum ideal karena belum dijalankan dengan baik. Kita masih terkendala masalah manajerial sehingga hanya sekedar berjalan, tapi menurut saya manajemennya harus ditingkatkan.	Untuk spanduk telah dipasang disemua kabupaten/kota, radio disiarkan melalui melalui frekwensi tersendiri sehingga mahasiswa didaerah yang jauh bisa mengikuti perkembangan. Namun banyak juga kendala sehingga hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pimpinan untuk melaksanakan hal	Masalah prosedur mungkin itu bukan kewenangan kami sebagai pengelola, namun semuanya ditentukan di UPBJJ, kami hanya melaksanakannya.

			ini agar bisa direalisasikan sesuai yang dianggarkan. Misalnya tentang transport pelaksanaan sosprom di radio yang belum dibayarkan.	
4	Rincian Biaya Yang Digunakan	Saya tidak jamin kalau realisasi dan riancian biaya sebagaimana telah disebutkan diatas.	Tidak jelas. Yang saya tahu untuk spanduk Rp 10.000.000 yang terdiri dari biaya cetak, biaya kirim, biaya pemasangan dan biaya perijinan. Namun kenyataannya tidak sesuai. Untuk radio telah berjalan sesuai yang direncanakan, namun pertanggungjawab an tidak sesuai. Dari total anggaran yang direncanakan, sisa anggaran yang tidak dipakai akan dikembalikan. (tidak dicairkan)	Menyangkut rincian biaya kami tidak tahu, kami hanya menerima spanduk, lalu selanjutnya kami harus mengurus ijin dan melakukan pemasangan dengan biaya sendiri.
5	Waktu Pelaksanaan	Sosialisasi dan promosi bisa berjalan kapan saja. Namun idealnya sebelum registrasi sudah harus direncanakan. Untuk itu harus dimulai dengan	Kurang tepat. terlalu dekat dengan waktu penutupan registrasi. Sementara untuk sosprom lewat radio perlu diperhatikan untuk dilaksanakan (disiarkan) pada	Kalau bisa sosialisasi dilaksanakan saat waktu registrasi mata kuliah dilaksanakan , sehingga pada saat itu juga mahasiswa

		membuat tim, siapa melakukan apa dan anggarannya sudah harus siap sebelum kegiatan berjalan.	jam istirahat atau hari libur.	bisa melakukan registrasi.
--	--	--	--------------------------------	----------------------------

NO	Variabel	Tanggapan Informan		
		Kepala UPBJJ	Kasubbag TU	Pengelola UT
C	ANGKA PARTISIPASI MAHASISWA			
1	Jumlah Mahasiswa Baru yang Mendaftar	Naik turunnya mahasiswa tergantung bagaimana kita memeliharanya. Yang lebih mendasar itu adalah memelihara mahasiswa yang telah ada.	Memang terjadi penurunan, dan kita akan koornasikan lagi	Terdapat kenaikan jumlah mahasiswa baru
2	Jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi ulang	Walaupun terjadi penurunan angka registrasi mata kuliah namun kita harus tetap berusaha untuk mengingatkannya , mengingat daya jangkau sangat terbatas.	Ini juga terjadi penurunan, dan kedepan sosprom harus dikelola dengan baik.	Harus kami akui kalau terjadi penurunan jumlah mahasiswa yang melakukan regisstrasi ulang karena keterlambatan informasi yang mereka peroleh.

D. Analisis Data

Dalam Penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dalam pandangan Edwards, implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil.

Menurut George C. Edwards III, Ada empat variable utama dalam implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. sehingga hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Peningkatan ini bisa saja dimulai dari penyederhanaan pengertian dengan cara membekdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Komponen-komponen tersebut antara lain:

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Dalam penelitian ini terlihat bahwa, komunikasi sebagaimana yang diharapkan belum terlaksana dengan baik sehingga hal ini berpengaruh

kepada perencanaan kegiatan sosialisasi dan promosi. Bahkan yang selama ini terjadi di UPBJJ UT Ambon adalah Komunikasi menyangkut sosprom selama ini masih terpusat di kasubbag TU, belum ada ide-ide yang efektif dalam pengelolaan terutama masukan dari staf. .

Selanjutnya untuk mancapat tujuan dari implelementasi kebijakan terutama dalam komunikasi maka konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementator mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

2. Sumberdaya

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Staf pelaksanan sosialisasi dan promosi yang terdiri dari 6 staf akademik dengan kualifikasi pendidikan S2 (magister) 6 staf administrasi dengan kualifikasi pendidikan s1 sebanyak 4 orang dan SMA/ sederajat 2 orang dirasa cukup untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan promosi. Namun kendala komunikasi dan perencanaan berakibat sosialisasi dan promosi periode 2013 tidak efektif.

Karena Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

3. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Seharusnya dibuat rencana dalam rapat persiapan sosialisasi dan promosi dengan melibatkan semua staf, mengevaluasi sosprom sebelumnya dan menentukan mana yang efektif untuk dilaksanakan. Namun yang terjadi adalah mengulang sosialisasi dan promosi sebelumnya (2012) dimana tanpa perencanaan, kurang tepat sasaran.

Kondisi inilah yang terjadi di UPBJJ UT Ambon dimana implementator kebijakan sosialisasi dan promosi masih berjalan sendiri tanpa melibat staf lainnya terutama dalam perencanaan. Bahkan budaya kerja di di UPBJJ UT Ambon belum ideal sebagaimana yang diharapkan.

sehingga kedepan budaya kerja ini harus dirubah serta ditingkatkan efektifitas pelaksanaannya.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Pemahaman tersebut diatas haruslah menjadi pijakan dalam melakukan rencana-rencana kegiatan. penelitian ini tentunya ingin memberikan gambaran mengenai kondisi riil pada objek penelitian. Menyangkut struktur birokrasi, maka tidak terlepas dari tata kelola. Dalam hubungannya dengan sosialisasi dan Promosi maka kita mulai dari Tata Usaha. Dari Tata Usaha kita akan mulai dengan perencanaan yang baik sehingga hasil yang didapatkan juga sesuai harapan.

untuk mencapai harapan tersebut, tentunya dukungan staf harus optimal. namun yang terjadi di lokasi penelitian masih kurang terutama dalam memberikan saran-saran, perencanaan karena selama ini masih terpusat pada kasubag TU. Struktur birokrasi cukup baik tapi perlu adanya komunikasi yang rutin untuk efektivitas dan dijalankan dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Kantor Pembantu Rektor IV UT Tentang Pemberian Tambahan Dana Sosialisasi dan Promosi Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Mahasiswa di UPBJJ UT Ambon.

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut dilakukan sebuah penelitian untuk menganalisis Implementasi Kebijakan tersebut dilihat dari Variabel Implementasi Kebijakan yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap, Struktur birokrasi. Variabel Sosialisasi dan Promosi yang meliputi Manajemen dan penyelenggaraan, Efektifitas pelaksanaan, Prosedur pelaksanaan, Rincian biaya yang digunakan, Waktu pelaksanaan, dan Variabel Angka Partisipasi Mahasiswa yang meliputi Jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan Jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi ulang (Mata Kuliah)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Kantor Pembantu Rektor IV tentang Pemberian Tambahan Dana Sosialisasi dan Promosi dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Mahasiswa di UPBJJ UT Ambon tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini terlihat dari:

- a. belum adanya perencanaan yang matang menyangkut kegiatan sosialisasi dan promosi yang akan dilakukan.
- b. perencanaan sosialisasi dan promosi masih berpusat pada`salah satu bidang (Kasubbag) sehingga bagian lain merasa tidak punya tanggungjawab dalam merencanakan kegiatan sosialisasi dan promosi.
- c. belum transparannya informasi ketersediaan dan penggunaan dana sosialisasi dan promosi yang diterima UPBJJ UT Ambon dari kantor Pembantu Rektor

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan angka partisipasi mahasiswa, maka kegiatan sosialisasi dan promosi harus direncanakan secara matang.
2. Perlu adanya pelibatan semua staf dalam perencanaan kegiatan sosialisasi dan promosi sehingga target ketercapaian angka partisipasi mahasiswa dapat tercapai.
3. Hal yang sangat penting adalah adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran sosialisasi dan promosi.

B. Daftar Pustaka

Abdul Wahab Solihin, 2002, *Analisis Kebijaksanaan; dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Edwards III, George, 1980, *Implementating Public Policy, Congressional Quertetly Pres*, Washington DC.

Grindle, M, 1980, *Politic and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Pess, Princeton.

Jones, C. O; 1984, *Pengantar Kebijakan Publik*, Terjemahan Budiman, Raja Graphindo Perkasa, Jakarta.

Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Pusaka Cidesindo. Jakarta.

M. Riyas Rasyid, 1988, *Makna Pemerintahan*, Mutiara, Jakarta.

Mazmanian, Daniel A. Andpaul A. Gunn, *Policy : Case Studies and Political Theory, World Politics*, 16, No 4 (Juli 1964).

Prisman J. dan Wildawky; 1981, *Implementating Publik Policy*, Lewngton Book, London.

Salman H. Tandjung, 2005, *Sistem Pemerintahan Desa*, Alqaprint.

Solihin Abdul Wahab, 2008, *Analisis Kebijaksanaan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tahir, Arifin, (2011). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Pustaka Indonesia Press

Wikipedia, 2001, *Pemerintahan Daerah*, <http://www.wikipwdia.org>, 8 Juli.